

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Strategi Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Meningkatkan Citra Positif di Masyarakat*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dalam membangun citra positif melibatkan berbagai pendekatan, di antaranya adalah kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, serta penyusunan program-program edukatif yang berorientasi pada peningkatan literasi informasi publik. Strategi tersebut disusun dan dijalankan dengan mengacu pada model strategi komunikasi Hafied Cangara yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan.
2. Respons masyarakat terhadap strategi komunikasi yang dijalankan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang mengetahui keberadaan dan fungsi Komisi Informasi memberikan tanggapan positif. Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terlibat secara aktif akibat rendahnya literasi informasi serta rendahnya tingkat keterlibatan emosional (*ego involvement*), sebagaimana dijelaskan dalam teori Penilaian Sosial oleh Muzafer Sherif.
3. Berdasarkan analisis SWOT, Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kekuatan dalam bentuk struktur organisasi yang jelas, komitmen internal, dan dukungan regulatif. Peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan antara lain meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transparansi informasi dan dukungan dari media lokal. Adapun kelemahan yang ditemukan mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Ancaman eksternal yang dihadapi antara lain resistensi dari badan publik, rendahnya kesadaran

masyarakat, serta dinamika politik yang kadang memengaruhi independensi lembaga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Informasi Provinsi Banten, disarankan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan media digital dan platform komunikasi berbasis komunitas agar jangkauan informasi lebih merata. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi publik juga perlu diperkuat.
2. Pemerintah daerah dan badan publik lainnya hendaknya lebih proaktif dan kooperatif dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, karena transparansi informasi merupakan fondasi utama dari pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
3. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya hak atas informasi publik. Hal ini dapat dimulai dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan edukatif dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi maupun lembaga lainnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan studi lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya melalui pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi komunikasi lembaga publik.